

Kanada Sanksi Sembilan Pejabat Rusia, Kremlin Bersumpah Akan Membalas

OTTAWA(AM)- Kementerian Luar Negeri Kanada mengatakan mereka memberlakukan sanksi baru pada sembilan pejabat Moskow atas pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia di Rusia. Keputusan ini mendorong Kremlin untuk bersumpah akan membalas kebijakan Kanada.

Kantor Urusan Global Kanada mengatakan sanksi ini adalah bagian dari upaya diplomatik untuk menekan pejabat senior Rusia atas percobaan pembunuhan dan penahanan terhadap kritikus terkemuka Alexei Navalny, dan perlakuan terhadap pengunjuk rasa warga.

"Kanada akan terus meningkatkan tekanan pada pemerintah Rusia untuk membebaskan tanpa syarat Navalny dan pendukungnya yang telah ditahan secara tidak sah," kata Menteri Luar Negeri Kanada, Marc Garneau, dalam sebuah pernyataan.

"Pelanggaran hak asasi manusia berat Rusia tidak

akan terjawab," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/3).

Navalny ditangkap awal tahun ini ketika dia kembali ke Rusia dari Jerman di mana dia telah pulih setelah diracun dengan racun saraf kelas militer.

Ribuan orang kemudian ditahan dalam serangkaian aksi protes jalanan. Sekutu Navalny pada Selasa (23/3), mengumumkan rencana untuk menggelar protes anti-Kremlin yang lebih besar pada musim semi ini, dalam upaya untuk memenangkan kebebasannya.

Kanada mengatakan sanksi tersebut sejalan dengan tindakan yang sebelumnya diambil oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Menanggapi hal itu, Kremlin mengatakan bahwa Moskow akan merespons keputusan Kanada untuk menajutkannya apa yang digambarkannya sebagai sanksi ilegal terhadap Rusia, kantor berita RIA melaporkannya. • gul

PM PALESTINA TANAM POHON

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menanam pohon selama upacara pembukaan pabrik pengolahan air limbah, di Tayasir di West Bank yang diduduki Israel, Rabu (24/3).

IDN/ANTARA



Korut Tembakan Rudal Balistik ke Laut Jepang, AS dan Korsel Siaga

Pasukan Korsel dan AS sama-sama memantau situasi setelah pasukan Korut menembakkan dua rudal balistik ke Laut Jepang pagi ini.

SEOUL(IM) - Korea Utara meluncurkan dua rudal balistik ke laut dekat Jepang pada Kamis (25/3), kata perdana menteri Jepang. Langkah Pyongyang itu memicu ketegangan menjelang Olimpiade Tokyo dan meningkatkan tekanan pada pemerintahan baru Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.

Resolusi Dewan Keamanan PBB melarang Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik dan jika peluncurannya

dikonfirmasi, itu akan menjadi tantangan baru bagi upaya Presiden Joe Biden untuk terlibat dengan Pyongyang.

Dalam pernyataan pada Kamis, Komando Indo-Pasifik militer Amerika Serikat mengatakan bahwa peluncuran rudal itu menyoroiti ancaman program senjata terlarang Korea Utara terhadap tetangganya dan komunitas internasional. Komando mengatakan sedang memantau situasi dan berkonsultasi dengan sekutu.

Pemerintah Jepang mengatakan satu rudal terbang sekitar 450 km dan mendarat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang, menandakan itu adalah rudal jarak pendek.

"Peluncuran pertama hanya dalam waktu kurang dari satu tahun merupakan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas di Jepang dan kawasan serta melanggar resolusi PBB," kata Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dalam komentar yang disiarkan oleh penyiar publik NHK.

Peluncuran tersebut bertepatan dengan dimulainya estafet obor Olimpiade di Jepang pada Kamis, memulai hitungan mundur empat bulan untuk Olimpiade musim panas di Tokyo yang ditunda dari 2020 karena pandemi.

Suga mengatakan dia akan memastikan Olimpiade yang aman dan terjamin dan "membahas secara menyeluruh" masalah Korea Utara termasuk peluncurannya dengan Biden selama kunjungannya ke Washington bulan depan.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) sebelumnya melaporkan setidaknya dua "proyektil tak dikenal" ditembakkan ke laut antara semenanjung Korea dan Jepang dari Provinsi Hamgyong Selatan Korea Utara di pantai timur. Badan intelijen Korea Selatan dan AS sedang menganalisis data peluncuran tersebut untuk mendapatkan informasi tambahan, kata JCS dalam sebuah pernyataan.

Gedung Biru kepresidenan Korea Selatan akan men-

adakan pertemuan darurat dewan keamanan nasional untuk membahas peluncuran tersebut. Penjaga pantai Jepang memperingatkan kapal agar tidak mendekati benda yang jatuh dan meminta mereka untuk memberikan informasi kepada penjaga pantai.

Pada awal 2018, Korea Utara mengumumkan moratorium pengujian senjata nuklir dan rudal balistik antarbenua (ICBM), meskipun dikatakan tidak lagi terkait oleh hal itu setelah negosiasi dengan pemerintahan Trump terdengar.

Pyongyang telah menguji sejumlah rudal jarak pendek baru yang dapat mengancam Korea Selatan dan 28.500 tentara AS yang ditempatkan di sana, terakhir pada Maret 2020. • tom

IAEA Dorong Kesepakatan Nuklir Baru untuk Iran

TEHERAN(IM) - Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengatakan menghidupkan kembali perjanjian nuklir antara Iran dan kekuatan dunia tidak mungkin. Dia menyerukan untuk mencapai kesepakatan baru untuk

mengatasi masalah nuklir tersebut.

Dalam wawancara dengan surat kabar Spanyol, El Pais, Grossi menegaskan perjanjian lama telah berakhir setelah Teheran mulai memproduksi uranium tingkat enrichment yang lebih tinggi yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir. Dia pun tidak

menerima penggunaan inspeksi nuklir Iran sebagai sarana untuk menekan pihak-pihak dalam kesepakatan tersebut.

Grossi sebelumnya mengatakan, tidak ada cara cepat untuk kembali ke kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015. "Beberapa masalah dan perkembangan telah terjadi secara rahasia baru-baru ini," ujarnya merujuk pada pelanggaran perjanjian Iran.

Desember lalu, utusan Iran untuk IAEA, Kazem Gharibabadi, menolak saran Grossi bahwa menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran setelah

pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) berkuasa akan membutuhkan kesepakatan baru. Mantan Presiden AS, Donald Trump, secara sepihak menarik diri dari kesepakatan pada 2018 dan menjatuhkan sanksi pada Iran. • ans

PBB Benarkan Ancaman Pembunuhan Terhadap Penyidik Khashoggi Oleh Saudi

JENEWA(IM) - Kantor hak asasi manusia PBB mengkonfirmasi ancaman pembunuhan terhadap penyidik pembunuhan Jamal Khashoggi oleh seorang pejabat senior Arab Saudi.

Sebelumnya, surat kabar The Guardian mengutip pernyataan Agnes Callamard, ahli PBB tentang pembunuhan di luar hukum, yang mengatakan seorang pejabat Saudi telah mengancamnya akan "diurus" jika dia tidak dikendalikan dalam penyelidikannya atas pembunuhan jurnalis Washington Post tersebut.

"Kami mengonfirmasi bahwa rincian dalam laporan Guardian tentang ancaman yang ditujukan pada Agnes Callamard adalah akurat," kata juru bicara hak asasi manusia PBB, Rupert Colville.

"Kantor hak asasi manusia PBB telah memberi tahu Callamard tentang ancaman tersebut serta keamanan dan otoritas PBB," tambahnya, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/3).

Sementara Callamard tidak merespons saat dihubungi oleh Reuters, pejabat Arab Saudi tidak menanggapi permintaan komentar.

Callamard mengatakan kepada Guardian bahwa ancaman itu disampaikan dalam pertemuan Januari 2020 antara pejabat Arab Saudi dan PBB di Jenewa. Dia mengatakan dia diberitahu tentang insiden itu oleh seorang rekan PBB, surat kabar itu melaporkan.

Callamard memimpin penyelidikan PBB atas pembunuhan Khashoggi pada Oktober 2018 oleh agen Saudi di konsulat kerajaan Teluk itu di Istanbul. Pada 2019 dia mengeluarkan laporan yang menyimpulkan ada "bukti kredibel" bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman dan pejabat senior Saudi bertanggung jawab atas pembunuhan jurnalis Washington Post dan warga AS itu.

Dia kemudian menyerukan sanksi terhadap aset Panganan Mohammed bin Salman dan keterlibatan internasional. Panganer Mohammad bin Salman menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan itu tetapi mengatakan dia memikul tanggung jawab utama karena itu terjadi di bawah pengawasannya.

The Guardian melaporkan ancaman yang dituduhkan itu dibuat selama pertemuan antara diplomat Saudi yang berbasis di Jenewa, delegasi Saudi yang berkunjung dan pejabat PBB. Setelah pihak Saudi mengkritik pekerjaan Callamard dalam kasus tersebut, surat kabar tersebut melaporkan, seorang pejabat senior Saudi mengatakan dia telah berbicara dengan orang-orang yang siap untuk "menjaganya."

"Ancaman kematian. Begitu-tulah cara memahaminya" Callamard seperti dikutip surat kabar yang berbasis di Inggris itu.

"Orang-orang yang hadir, dan juga kemudian, menjelaskan kepada delegasi Saudi bahwa ini sama sekali tidak pantas," Callamard menambahkan.

Callamard mengkritik keputusan pengadilan Saudi pada bulan September untuk memenjara delapan orang hingga 20 tahun atas pembunuhan itu. Ia menuduh kerajaan membuat "ejekan terhadap keadilan" dengan tidak menghukum pejabat yang lebih senior.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, yang telah mengambil sikap lebih keras terhadap catatan hak asasi manusia Saudi, bulan lalu merilis laporan intelijen yang mengatakan Pangeran Mohammed bin Salman menyetujui operasi untuk menangkan atau membunuh Khashoggi.

Pemerintah Arab Saudi menolak temuan tersebut dan mengesakan kembali bahwa pembunuhan itu adalah kejahatan keji oleh kelompok nakal.

Callamard, yang penggantian diusulkan Rabu, mengambil posisi baru sebagai sekretaris jenderal Amnesty International. • gul

Massa Pro-Demokrasi Myanmar akan Lanjutkan Aksi Protes

YANGON(IM)- Aktivis pro-demokrasi Myanmar akan melanjutkan demonstrasi pada Kamis (25/3). Demonstrasi dilanjutkan sehari setelah aksi mogok massal nasional yang membuat sebagian besar bisnis tutup, dan orang-orang tetap tinggal di rumah sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan militer.

Aksi mogok massal yang dilakukan secara diam-diam Rabu (24/4), membuat area pusat komersial yang biasanya ramai seperti Yangon dan Monywa tampak sepi. Skala protes jalanan telah menurun dalam beberapa hari terakhir, dan para aktivis menyerukan demonstrasi besar lanjutan pada Kamis (25/3). "Badai terkutuk datang setelah keheningan," kata pemimpin protes Ei Thinzar Maung.

Aksi menyalaakan lilin terjadi di seluruh Myanmar semalam. Foto-foto yang beredar di media sosial menunjukkan, beberapa aksi protes skala kecil sudah dimulai pada Kamis pagi.

Di Thanyin di pinggiran Yangon pengunjuk rasa mengangkat plakat bertuliskan:

"Kami tidak menerima kudeta militer". Sementara staf medis yang mengenakan jas putih mengadakan pawai fajar di kota kedua Mandalay.

Menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), 286 orang telah tewas saat pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan untuk membubarkan demonstran. Myanmar Now melaporkan, lima orang lagi terluka dalam bentrokan tadi malam di Mandalay. Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun meninggal setelah ditendak di punggungnya.

Junta pada Rabu (24/3) membebaskan ratusan orang yang ditangkep dalam aksi protes terhadap penggalangan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Pihak berwenang tidak memberikan angka pasti jumlah tahanan yang dibebaskan. Namun AAPP mengatakan, 628 orang dibebaskan setelah lebih dari 2.900 orang ditangkep sejak kudeta.

Junta militer menghadapi kecaman internasional, karena melakukan kudeta yang meng-

hentikan transisi Myanmar menuju demokrasi melambat. Selain itu, mereka ditekam karena melakukan penindasan terhadap perbedaan pendapat.

Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap individu yang terlibat dalam kudeta dan penindasan terhadap para demonstran.

Sementara itu, Departemen Keuangan AS memasukkan dua konglomerat yang dikendalikan oleh militer yaitu Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). Departemen Keuangan membebaskan semua aset yang mereka miliki di Amerika Serikat. Militer mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan mereka.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta. Malaysia dan Indonesia sedang mengupayakan pertemuan mendesak negara-negara ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar. • tom



OBOR OLIMPIADE TOKYO 2020

Pembawa obor Grand Start Estafet Obor Olimpiade Tokyo 2020 Nadeshiko Japan, tim sepak bola perempuan nasional Jepang, memimpin estafet obor di Naraha, prefektur Fukushima, Jepang, Kamis (25/3).

AS Jatuh Sanksi Dua Perusahaan Terkait Militer Myanmar

WASHINGTON(IM) - Amerika Serikat (AS) akan menjatuhkan sanksi kepada dua korporasi yang dikendalikan oleh militer Myanmar. Departemen Keuangan AS memasukkan Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) ke dalam daftar hitam dan membekukan aset apa pun yang mereka miliki di AS.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif pada 11 Februari yang membuka jalan bagi sanksi baru terhadap militer Myanmar dan kepentingannya. Perintah tersebut membekukan cadangan sekitar 1 miliar dolar AS yang dipegang bank sentral Myanmar di New York Fed, yang coba ditarik oleh junta setelah merebut kekuasaan.

Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan Kanada, telah menjatuhkan beberapa sanksi terhadap jenderal tinggi Myanmar termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing. Namun dari sejumlah sanksi yang dijatuhkan oleh negara Barat, tidak ada yang menargetkan kepentingan bisnis militer Myanmar.

Militer melakukan kudeta pada 1 Februari dan menahan para pemimpin sipil termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Militer mengklaim ada kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan oleh Suu Kyi. Kudeta memicu pemberontakan yang meluas di Myanmar. Pasukan keamanan menggunakan kekerasan untuk menghadapi para demonstran sehingga menimbulkan korban jiwa. Hingga saat ini sedikitnya 275 orang tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan. • ans



IDN/ANTARA

KELUARGA MIGRAN PENCARI SUAKA

Keluarga migran pencari suaka dari Amerika Tengah berbaris untuk dipindahkan dari pusat proses sementara Beaucukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat di bawah Jembatan Internasional Anzalduas setelah menyebrang sungai Rio Grande masuk ke Amerika Serikat dari Meksiko di Granjeno, Texas, Amerika Serikat, Rabu (24/3). Foto diambil dengan drone.

Pengadilan India Jatuhkan Vonis Mati pada 3 Pelaku Kasus Perkosaan Beramai-ramai

LUCKNOW (IM)- Pengadilan khusus di Uttar Pradesh, India pada Rabu (24/3) memvonis tiga tersangka kasus perkosaan dan pembunuhan beramai-ramai Aarushi dengan hukuman mati. Insiden perkosaan beramai-ramai yang menggemparkan India itu terjadi pada 2 Januari 2018 di Bulandshahr, hampir 108 km dari Delhi.

Dalam perintahnya, pengadilan Perlindungan Anak dari Pelanggaran Seksual (POCSO) menyatakan bahwa tiga terpidana, Zulfikar Abbasi, Dilshad Malani, akan dihukum mati berdasarkan Pasal 302 (Pembunuhan) / 34 (Perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang) dalam kelanjutan dari niat bersama) dari KUHP India.

"Tiga narapidana Zulfikar, Dilshad dan Israel harus digantung di leher mereka sampai mati," bunyi perintah itu, lebih lanjut menyebutkan bahwa narapidana juga dihukum dengan denda sebesar INR 100.000 (sekitar Rp19,8 juta).

Kasus Aarushi, peristiwa perkosaan dan pem-

bunuhan beramai-ramai di dalam mobil yang bergerak itu telah menimbulkan kehebohan politik di Uttar Pradesh, bahkan polisi disalahkan atas keterlambatan mengambil tindakan. Polisi menangkap ketiga terdakwa dan mengirim mereka ke penjara sepuluh hari setelah kejadian tersebut.

Terdakwa setelah penangkapan telah menyiratkan bahwa mereka melakukan kejahatan itu untuk bersejeng-senang.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Uttar Pradesh, yang dipimpin oleh biksu Hindu Yogi Adityanath, telah dikritik habis-habisan karena penegakan hukum dan keterlibatannya serta tingkat kejahatan yang meningkat terhadap wanita di negara bagian itu. Berdasarkan laporan Biro Catatan Kejahatan Nasional terbaru, yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Serikat, Uttar Pradesh menyumbang 59.853 kejahatan terhadap perempuan - 14 persen dari total nasional - pada 2019 saja. • gul